

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi adalah suatu wadah yang menaungi sekumpulan orang dengan visi dan misi yang sama demi mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi mutlak diperlukan karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial, yakni berbaaur dengan sesama. Organisasi dalam masyarakat juga diperlukan untuk mempermudah penyaluran aspirasi warga. Dengan adanya organisasi dalam masyarakat, warga jadi terbiasa dengan apa yang dilakukan dalam organisasi, misalnya, bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, saling menghargai pendapat, dan lain-lain.

Akan tetapi keberadaan suatu organisasi haruslah jelas dan mempunyai kebermanfaatan tidak hanya bagi organisasinya saja tetapi berguna bagi masyarakat lain diluar organisasi tersebut. Karena ciri dari organisasi yang baik adalah mendapat tempat di hati masyarakat. Artinya masyarakat harus bisa merasakan manfaat yang besar dari keberadaan organisasi tersebut. Maka organisasi dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat sekitar.

Apabila sebuah organisasi sudah mendapat tempat dihati masyarakat nya, sudah dipastikan bahwa organisasi tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sekitar. Kepercayaan masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya suatu organisasi yang baik, karena tanpa ada kepercayaan dari anggota dan masyarakatnya terhadap organisasi tersebut, seperti halnya suatu hubungan yang tidak dibangun atas dasar saling kepercayaan maka hubungan pun tidak akan bertahan lama dan cenderung lebih banyak konflik dalam suatu hubungan tersebut, dan begitupun sebuah organisasi.

Dalam sebuah organisasi, manfaat kepercayaan diantaranya adalah terciptanya iklim saling berbagi informasi dan kolaborasi. Di tengah-tengah perubahan dan ketidakpastian, kepercayaan menjadi landasan bagi kukuhnya suatu kepemimpinan. Jadi jelaslah bahwa kepercayaan adalah asset yang tidak

berwujud (*intangible asset*) yang sangat berharga bagi suatu organisasi. Meski penting, namun nyatanya menumbuhkembangkan, mempertahankan, dan memulihkan kepercayaan jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Di dalam suatu masyarakat Indonesia terdapat organisasi atau lembaga yang dibentuk dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan pada umumnya bersifat sosial yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Lembaga masyarakat dapat dibentuk berdasarkan peraturan daerah maupun atas inisiatif sendiri.

Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat memiliki lembaga kemasyarakatan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Budiyanto (2003, hlm. 175), Ormas merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi kemasyarakatan termasuk di dalamnya yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sudah ada sejak dulu dan mulai berkembang pesat pada masa orde baru. Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Wirosarjono (dalam Hagul, 1992, hlm.139), Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi masyarakat bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. Sebutan LSM ini belakangan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki konotasi khas.

Sebagai salah satu bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat, corak kegiatannya khas, karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula.

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Gerakan LSM muncul secara alami sebagai reaksi atas kondisi sosial politik termasuk kondisi ekonomi.

Namun ada juga beberapa LSM yang sudah keluar dari tupoksinya sebagai sebuah LSM, dimana ada beberapa LSM yang tidak lagi memberikan pelayanan secara sukarela kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap warga negara atas tindakan-tindakan LSM yang sudah keluar dari tupoksinya tersebut.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat Ganie Rochman (dalam Maruto & Anwari, 2002, hlm. 183), dengan adanya masalah tersebut, tentunya ini menjadi tugas peneliti untuk menganalisis apakah keberadaan LSM sebagai organisasi masyarakat ini masih mendapat kepercayaan masyarakat atau tidak.

Karena salah satu penyebab kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik. Maka selain organisasi masyarakat, penulis pun menganalisis mengenai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang termasuk ke dalam organisasi politik.

Sistem politik Indonesia, di dalamnya terdapat partai politik yang termasuk kedalam organisasi politik sebagai pilar utama yang menjadi alat politik rakyat untuk melakukan perubahan, karena partai politik telah dijamin

dengan Undang-undang menjadi media bagi rakyat untuk terlibat dalam kekuasaan.

Partai politik merupakan suatu wadah atau sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara, Budiardjo (2008, hlm. 403) mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Selanjutnya menurut Neumann (dalam Budiardjo, 2008, hlm. 404), mengemukakan definisinya sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).

Pandangan Neumann tersebut di atas, mempertegas bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Partai politik yang termasuk kedalam organisasi politik digunakan sebagai sarana perubahan kearah yang lebih baik. Namun yang terjadi saat ini rakyat belum merasakan kesejahteraan seperti yang diinginkan. Partai politik termasuk lembaga-lembaga politik kenegaraan lainnya dianggap lemah dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa sehingga membiarkan terjadinya dominasi dan manipulasi negara terhadap masyarakat.

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai "pengeras suara" (Budiardjo, 2008, hlm. 406).

Apabila menilik dari pernyataan tersebut peran partai politik saat ini sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai “pengeras suara” mereka, dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Berikut hasil penelitian oleh SSI (Skala Survei Indonesia) mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Diagram 1.1 Kepercayaan Terhadap Parpol untuk Memperjuangkan Kepentingan Rakyat (%)



Sumber: Sekala Survei Indonesia (SSI) oleh Abdul Hakim H. (2011)

Hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) pada 2011 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia 51.4 persen menyatakan tidak percaya bahwa parpol akan memperjuangkan kepentingan mereka. Hanya sebesar 32.3 persen yang percaya bahwa parpol akan memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara 16.3 persen menyatakan abstain.

Hasil survei nasional oleh SSI (Skala Survei Indonesia), dapat dijadikan sebagai data awal mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan hasilnya masyarakat yang menyatakan tidak percaya terhadap partai politik masih lebih banyak dari pada masyarakat yang percaya terhadap partai politik.

Karena partai politik identik dengan pengajuan kandidat pada pemilihan umum. Selanjutnya, mengenai tingkat kepercayaan masyarakat

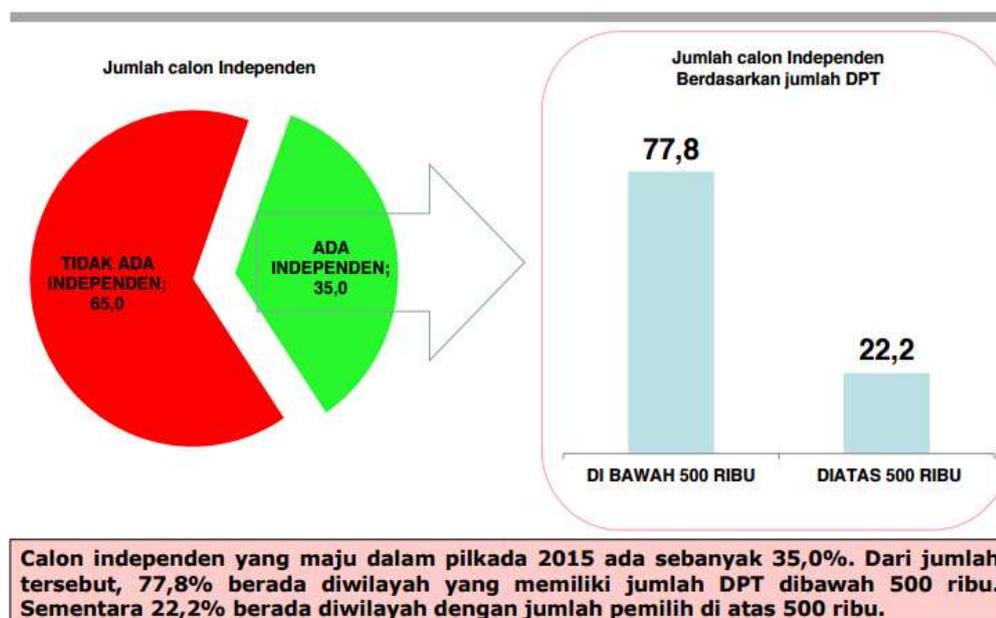
terhadap parpol, penulis mengaitkan pula dengan istilah deparpolisasi, sebagian orang berkomentar bahwa deparpolisasi itu adalah sebuah ketidakpercayaan terhadap eksistensi partai politik.

Berikutnya ada lagi yang berpendapat bahwa deparpolisasi itu tak lebih sebuah tamparan bagi partai politik. Bahkan secara ekstrim ada yang punya perspektif yang lain kalau deparpolisasi itu adalah untuk menghindari biaya mahal politik yang mahal karena harus membeli partai sebagai kendaraan politiknya, selanjutnya untuk menghindari adanya tekanan secara politis sekaligus bagi-bagi kekuasaan (*distribution of power*).

Istilah deparpolisasi sebetulnya sudah ada sejak pemilihan umum secara langsung tahun 2005 dimana dari pilkada ke pilkada terdapat calon-calon yang memilih jalur independen dan tidak memilih partai politik sebagai kendaraan politiknya. Pertanyaannya, apakah benar masyarakat saat ini sudah mulai tidak percaya terhadap eksistensi partai politik?

Berikut ini hasil survei yang dilakukan oleh SSI (Skala Survei Indonesia) mengenai calon independen berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Diagram 1.2 Jumlah Wilayah Yang Ada Calon Independen Dan Proporsi Berdasarkan DPT



Sumber: Skala Survei Indonesia (Hakim, 2015, hlm. 19)

Seperti yang terlihat dari penelitian SSI, 77,8 persen calon independen ada diwilayah yang memiliki jumlah DPT dibawah 500 ribu pemilih. Sementara sisanya, 22,2 persen ada diwilayah dengan jumlah DPT di atas 500 ribu pemilih. Dengan demikian dari data hasil survei oleh SSI, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sudah mulai menurun, dilihat dari cukup banyaknya calon pejabat yang memilih jalur independen dan tidak memilih partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Dan dari latar belakang masalah yang demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas dan Parpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik** (*Deskriptif analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kabupaten Sumedang*)”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai “*Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas dan Parpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik*”

Masalah tersebut merupakan masalah pokok yang melahirkan sub masalah lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik?
5. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Ormas dan Parpol dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, menggambarkan dan menganalisis serta memperoleh data mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- c) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- d) Untuk memperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- e) Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan oleh Ormas dan Parpol dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoretis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu pengembangan keilmuan PKn yang di dalamnya memuat tentang pentingnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya memberikan pengetahuan tambahan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.

2. Secara praktis

- a) Memperoleh informasi mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.

- b) Memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap kinerja Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- c) Memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- d) Memperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ormas dan Parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.
- e) Mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan oleh Ormas dan Parpol dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.

BAB III: Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik.

BAB IV: Analisis hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pandangan masyarakat terhadap eksistensi ormas dan parpol, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan parpol.

BAB V: Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.